

PENDAMPINGAN DIGITALISASI UMKM MELALUI PENDAFTARAN QRIS DAN PEMBUATAN GOOGLE MAPS SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DESA KWALA AIR HITAM DUSUN IV (VETERAN)

Siti Aisyah Marpaung¹, Pani Akhiruddin Siregar²

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : sitiaisyahh6451@gmail.com, paniakhiruddin@umsu.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital dan layanan peta daring menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi. Namun, sebagian pelaku usaha di Desa Kwala Air Hitam, Dusun IV (Veteran), Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, masih menerima pembayaran secara tunai dan belum terdaftar pada Google Maps. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku UMKM dalam pendaftaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan pembuatan lokasi usaha pada Google Maps untuk meningkatkan kemudahan transaksi serta visibilitas usaha. Kegiatan dilaksanakan pada 20-31 Agustus 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung (on the spot) yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, serta diskusi dan evaluasi. Mitra sasaran adalah satu usaha tahu dan satu kedai milik warga. Data dikumpulkan melalui observasi, diskusi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kedua mitra memperoleh kode QRIS untuk menerima pembayaran nontunai, lokasi usaha keduanya tampil pada Google Maps, serta pemahaman dan kepercayaan pemilik usaha terhadap teknologi digital meningkat berdasarkan pengamatan selama pendampingan. Kendala berupa keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan digital, dan keraguan terhadap keamanan pembayaran nontunai dapat diatasi melalui penjelasan berulang dan penyesuaian jadwal. Pendampingan lanjutan diperlukan agar pemanfaatan kedua layanan tersebut berkelanjutan.

Kata Kunci : Sosialisasi, Keterampilan, Pengetahuan, Peluang kerja

ABSTRACT

The development of digital payment systems and online maps requires Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to adapt. However, some business owners in Kwala Air Hitam Village, Hamlet IV (Veteran), Selesai District, Langkat Regency, still accept cash only and are not yet listed on Google Maps. This community service activity aimed to assist MSME owners in registering for the Quick Response Code Indonesian Standard

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagiarism Checker No

234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

(QRIS) and creating business location listings on Google Maps to improve transaction convenience and business visibility. The activity was carried out from 20 to 31 August 2026 as part of the Regular Community Service Program (KKN) of the Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, using a participatory approach and on-the-spot assistance consisting of preparation, implementation, and discussion and evaluation stages. The partners were one tofu producer and one village shop. Data were collected through observation, discussion, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative analysis. The results show that both partners obtained QRIS codes for accepting cashless payments, their business locations appeared on Google Maps, and the owners' understanding of and trust in digital technology improved based on observation during the assistance. Limited time, differing digital skills, and doubts about the security of cashless payments were overcome through repeated explanations and schedule adjustments. Follow-up assistance is needed to sustain the use of both services.

Keywords: *Digitalization of MSMEs, QRIS, Google Maps, Community Assistance, Community Service Program*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Republik Indonesia, 2012). KKN Reguler Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dilaksanakan di Dusun IV (Veteran), Desa Kwala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selama dua belas hari pada 20-31 Agustus 2026. Wilayah ini memiliki usaha masyarakat berupa warung desa dan usaha tahu. Seiring perkembangan teknologi digital, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut menyesuaikan kegiatan usahanya dengan kebutuhan konsumen, antara lain melalui penyediaan alternatif pembayaran digital dan kemudahan ditemukan secara daring.

Salah satu teknologi pembayaran digital yang paling banyak digunakan dan direkomendasikan di Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Aziz et al., 2026). Penerapan QRIS pada UMKM bertujuan mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat perputaran kas (Aziz et al., 2026), serta membuat transaksi tercatat secara otomatis sehingga pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertib (Aisyah et al., 2023). Namun, adopsi pembayaran digital oleh UMKM dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan (Davis, 1989; Widowati & Khusaini, 2022). Rasa percaya terhadap keamanan sistem pembayaran digital bahkan menjadi modal utama yang dicari pelaku usaha sebelum berani menggunakannya (Husna et al., 2024).

Selain pembayaran, visibilitas usaha merupakan aspek penting digitalisasi UMKM. Pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps berfungsi sebagai pemasaran digital berbasis lokasi karena membuat usaha lebih mudah ditemukan calon konsumen, meningkatkan kepercayaan publik melalui ulasan dan penilaian, serta memperluas jangkauan pasar tanpa biaya promosi yang besar (Jubaedah et al., 2026). Pemanfaatan QRIS dan Google Maps secara bersamaan telah banyak diterapkan dalam kegiatan pengabdian di tingkat desa maupun pada usaha warung (Nikmah & Wafa, 2025; Puspasari & Utami, 2025; Rimadias & Hibatillah, 2023). Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM tidak cukup dengan penyediaan sarana, tetapi memerlukan pendampingan agar pelaku usaha memahami dan percaya pada teknologi yang digunakan.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian UMKM di Dusun IV (Veteran), khususnya usaha warung dan usaha tahu, masih menerima pembayaran secara tunai dan belum terdaftar pada Google Maps. Akibatnya, usaha tersebut sulit ditemukan oleh pembeli dari luar dusun dan belum memperoleh manfaat transaksi nontunai yang tercatat otomatis. Akar permasalahan ini sejalan dengan temuan kegiatan terdahulu, yaitu minimnya pengetahuan dan rendahnya literasi digital pelaku UMKM (Nikmah & Wafa, 2025) serta keraguan terhadap keamanan pembayaran nontunai (Husna et al., 2024). Terdapat kesenjangan antara kondisi ideal, yaitu pelaku usaha yang memanfaatkan pembayaran digital dan peta daring untuk menjangkau konsumen, dan kondisi aktual di dusun tersebut. Berdasarkan kesenjangan ini, kegiatan KKN diarahkan pada pendampingan digitalisasi UMKM melalui pendaftaran QRIS dan pembuatan Google Maps, mengingat pendampingan langsung terbukti lebih efektif meningkatkan kesiapan digital pelaku UMKM dibandingkan penyampaian materi satu arah (Aziz et al., 2026).

Kegiatan ini bertujuan (1) mendampingi pelaku UMKM dalam pendaftaran QRIS untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi, serta (2) membantu pelaku UMKM membuat dan mendaftarkan lokasi usaha pada Google Maps untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas jangkauan pemasaran. Manfaat kegiatan dirasakan oleh tiga pihak. Bagi UMSU, kegiatan ini menjadi sarana implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memperkuat hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat. Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi sarana menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta melatih kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja sama. Bagi masyarakat, kegiatan ini memberi alternatif pembayaran nontunai yang lebih praktis dan identitas usaha pada peta digital sehingga mendukung pengembangan usaha. Manfaat tersebut sejalan dengan prinsip Manajemen Bisnis Syariah yang menekankan amanah, ketertiban, dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Digitalisasi Pembayaran dan QRIS

Digitalisasi pembayaran merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa bergantung pada uang tunai. QRIS merupakan standar kode QR nasional untuk pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada 2019 sehingga transaksi antarpenyedia layanan dapat saling terhubung (Bank Indonesia, 2019). Pada UMKM, QRIS memberikan alternatif pembayaran yang praktis dan

mempercepat perputaran kas (Aziz et al., 2026), serta mencatat transaksi secara otomatis (Aisyah et al., 2023). Penerimaan QRIS oleh pelaku UMKM dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model*, yaitu persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan memengaruhi penerimaan suatu teknologi (Davis, 1989). Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan adopsi QRIS pada UMKM, dengan kepercayaan dan sikap positif sebagai faktor pendukung (Widowati & Khusaini, 2022).

B. UMKM dan Digitalisasi Usaha

UMKM memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008). Digitalisasi membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan memperluas pemasaran. Putri (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan *financial technology* melalui sistem pembayaran berbasis QRIS memberi peluang sekaligus tantangan bagi UMKM di Kecamatan Medan Kota. Digitalisasi tidak hanya mencakup pembayaran, tetapi juga keberadaan usaha pada layanan digital agar mudah ditemukan konsumen.

C. GOOGLE MAPS Sebagai Pemasaran Digital Berbasis Lokasi

Google Maps memungkinkan usaha menampilkan nama, alamat, titik lokasi, jam operasional, nomor kontak, dan foto sehingga konsumen dapat menemukan usaha dengan mudah. Pendaftaran lokasi usaha pada layanan ini berfungsi sebagai pemasaran digital berbasis lokasi, meningkatkan kepercayaan publik melalui ulasan dan penilaian, serta memperluas jangkauan pasar tanpa biaya promosi yang besar (Jubaedah et al., 2026).

D. Pendampingan Digitalisasi UMKM

Penerapan teknologi pada UMKM tidak hanya memerlukan penyediaan fasilitas, tetapi juga pemahaman pelaku usaha dalam menggunakannya. Pendampingan langsung terbukti lebih efektif meningkatkan kesiapan digital pelaku UMKM dibandingkan penyampaian materi satu arah (Aziz et al., 2026). Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif kegiatan, bukan sekadar penerima materi (Chambers, 1994). Dalam konteks ini, pendampingan berperan menumbuhkan persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan melalui praktik langsung.

E. Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya, kegiatan ini memiliki fokus yang berbeda. Nikmah dan Wafa (2025) mendampingi Warung Alfarizqi dalam adopsi QRIS dan pendaftaran Google Maps melalui tahap perencanaan, sosialisasi dan pelaksanaan, serta evaluasi, dan melaporkan peningkatan literasi digital pelaku usaha. Puspasari dan Utami (2025) mengangkat pemanfaatan Google Maps dan QRIS sebagai strategi digitalisasi UMKM di Desa Neglasari, sedangkan Rimadias dan Hibatillah (2023) mendampingi pembuatan media informasi, QRIS, dan Google Maps pada UMKM Warung Opa. Jubaedah et al. (2026) menerapkan pendampingan serupa pada UMKM jasa laundry. Kegiatan ini berbeda karena dilaksanakan oleh mahasiswa KKN

Manajemen Bisnis Syariah pada usaha tahu dan kedai di dusun pedesaan Kabupaten Langkat, dengan pendekatan kualitatif serta pembahasan yang dikaitkan dengan prinsip amanah, ketertiban, dan transparansi usaha.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell & Poth, 2018) yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) (Chambers, 1994) dan pendampingan langsung secara tatap muka (*on the spot*). Pendekatan kualitatif dipilih karena kegiatan bertujuan memahami proses, pengalaman, dan perubahan pemahaman pelaku usaha selama pendampingan, bukan mengukur variabel secara numerik. Kegiatan dilaksanakan pada 20-31 Agustus 2026 di Dusun IV (Veteran), Desa Kwala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Pihak yang terlibat adalah mahasiswa KKN selaku pelaksana, dosen pembimbing lapangan, Kepala Dusun dan perangkat desa selaku pendukung koordinasi, serta pemilik UMKM selaku mitra.

Subjek kegiatan adalah dua pelaku UMKM, yaitu pemilik usaha tahu dan pemilik kedai, yang dipilih secara purposif berdasarkan hasil observasi karena masih menerima pembayaran tunai dan belum terdaftar pada Google Maps. Analisis kebutuhan (*needs assessment*) dilakukan melalui observasi terhadap kondisi usaha, pola transaksi pembayaran, dan keberadaan usaha pada layanan peta digital.

Kegiatan terdiri atas tiga tahap. *Tahap persiapan* meliputi survei lokasi, koordinasi dengan Kepala Dusun dan perangkat desa, observasi usaha masyarakat, penentuan mitra, penjelasan tujuan program kepada pemilik usaha, serta penyiapan materi dan kelengkapan berupa identitas pemilik, informasi usaha, alamat, dan foto lokasi usaha. *Tahap pelaksanaan* dilakukan secara tatap muka di lokasi usaha melalui pendampingan pendaftaran QRIS dan pendampingan pembuatan Google Maps. *Tahap diskusi dan evaluasi* dilakukan setelah pendampingan untuk mengetahui pemahaman dan kendala pemilik usaha.

Prosedur pendampingan QRIS adalah (1) menjelaskan pengertian QRIS, manfaatnya bagi kemudahan transaksi, dan aspek keamanannya agar pemilik usaha memahami dan yakin terhadap pembayaran nontunai; (2) mengisi data usaha bersama pemilik usaha; (3) melanjutkan pendaftaran hingga diperoleh kode QR yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran; dan (4) memberi kesempatan kepada pemilik usaha untuk mencoba layanan secara langsung. Prosedur pendampingan Google Maps adalah membantu pemilik usaha mendaftarkan lokasi usaha dengan melengkapi nama usaha, kategori usaha, alamat dan titik lokasi, jam operasional, nomor kontak, serta foto usaha, kemudian menjelaskan cara memperbarui informasi dan manfaat ulasan pelanggan sebagai sarana membangun kepercayaan calon konsumen.

Data dikumpulkan melalui observasi, diskusi dan tanya jawab dengan pemilik usaha, serta dokumentasi foto kegiatan. Keberhasilan kegiatan dinilai melalui tiga indikator, yaitu (1) mitra memperoleh kode QRIS yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran; (2) lokasi usaha

mitra tampil pada Google Maps; dan (3) pemilik usaha mampu menjelaskan kembali dan menggunakan QRIS. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014), dengan membandingkan temuan dari ketiga teknik pengumpulan data (triangulasi teknik) untuk menjaga keabsahan data. Selain program utama, mahasiswa melaksanakan program pendukung berupa edukasi bagi siswa MTs Al-Islamiyah, kegiatan keagamaan, dan gotong royong bersama warga.

HASIL PEMBAHSAN

Pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UMSU 2026 di Dusun IV (Veteran), Desa Kwala Air Hitam berlangsung selama dua belas hari, mulai dari kedatangan dan konfirmasi ke Balai Desa pada 20 Agustus 2026 hingga pelepasan dan penyerahan kembali mahasiswa pada 31 Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana 100% sesuai jadwal yang direncanakan. Rangkaian kegiatan yang berkaitan langsung dengan program inti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Program Inti Pendampingan Digitalisasi UMKM

Tanggal	Kegiatan	Tahap
20 Agustus 2026	Tiba di lokasi, konfirmasi kedatangan ke Balai Desa, survei posko, dan perancangan program kerja	Persiapan
21 Agustus 2026	Koordinasi awal dengan perangkat desa dan pihak terkait mengenai rencana digitalisasi UMKM; permohonan izin kepada MTs Al-Islamiyah untuk kegiatan edukasi pendukung	Persiapan
24 Agustus 2026	Sosialisasi dan kunjungan kepada pelaku UMKM; observasi kondisi usaha, kebiasaan transaksi, dan keberadaan usaha pada peta digital; penentuan mitra	Persiapan
25 Agustus 2026	Penyiapan materi manfaat QRIS dan Google Maps serta data usaha yang diperlukan; rapat bersama anggota kelompok	Persiapan
26 Agustus 2026	Pendampingan pembuatan QRIS dan Google Maps pada usaha tahu	Pelaksanaan
29 Agustus 2026	Pendampingan pembuatan QRIS dan Google Maps pada kedai milik warga	Pelaksanaan

Sumber: dokumentasi kegiatan KKN, 2026.

Capaian program inti menunjukkan bahwa usaha tahu dan kedai memiliki kode QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai dan lokasi kedua usaha telah tampil pada Google Maps. Berdasarkan observasi, pemilik usaha memahami cara kerja, manfaat, dan keamanan QRIS serta mencoba langsung layanan yang diperkenalkan. Capaian tersebut dirangkum pada Tabel 2. Penilaian bersifat observasional; kegiatan ini belum mengukur frekuensi transaksi, pendapatan, maupun jumlah kunjungan konsumen. Program pendukung berupa edukasi bagi siswa MTs Al-Islamiyah, kegiatan keagamaan, dan gotong royong juga mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat.

Tabel 2. Capaian Pendampingan Berdasarkan Indikator Keberhasilan

Indikator	Kondisi Awal	Setelah Pendampingan
Kepemilikan QRIS	Pembayaran tunai saja	Usaha tahu dan kedai memiliki kode QRIS untuk menerima pembayaran nontunai
Keberadaan pada Google Maps	Belum terdaftar	Lokasi kedua usaha tampil pada Google Maps
Pemahaman dan kepercayaan terhadap pembayaran nontunai	Sebagian pelaku usaha ragu terhadap keamanan pembayaran nontunai	Pemilik usaha memahami cara kerja, manfaat, dan keamanan QRIS serta mencoba langsung layanan

Sumber: observasi dan dokumentasi kegiatan KKN, 2026.

Berdasarkan hasil tersebut, pembahasan difokuskan pada program utama di bidang digitalisasi UMKM, yaitu pendaftaran QRIS dan pembuatan Google Maps, serta pendampingan yang menyertainya.

A. Kemudahan dan Efisiensi Transaksi melalui QRIS: Sebelum pendampingan, usaha tahu dan kedai hanya menerima pembayaran tunai sehingga pilihan pembayaran bagi konsumen terbatas. Pendaftaran QRIS memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis karena transaksi antarpemedia layanan saling terhubung, mempermudah pelayanan kepada pembeli, dan mempercepat perputaran kas usaha (Aziz et al., 2026). Transaksi nontunai juga tercatat secara otomatis sehingga membantu pelaku usaha menata pencatatan keuangan dengan lebih tertib (Aisyah et al., 2023). Manfaat ini sejalan dengan prinsip Manajemen Bisnis Syariah yang menekankan amanah, ketertiban, dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Capaian ini menjawab tujuan pertama kegiatan.

B. Visibilitas Usaha melalui Google Maps: Sebelum pendampingan, usaha warga belum terdaftar pada layanan peta digital sehingga sulit ditemukan oleh pembeli dari luar dusun. Pendaftaran pada Google Maps berfungsi sebagai pemasaran digital berbasis lokasi karena membuat usaha lebih mudah ditemukan, meningkatkan kepercayaan publik melalui ulasan dan penilaian, serta memperluas jangkauan pasar tanpa biaya promosi yang besar (Jubaedah et al., 2026). Dengan terdaptarnya usaha tahu dan kedai, peluang usaha untuk dikenal calon konsumen menjadi lebih besar. Pemanfaatan kedua layanan saling melengkapi: Google Maps membantu konsumen menemukan usaha, sedangkan QRIS memudahkan konsumen membayar. Capaian ini menjawab tujuan kedua kegiatan.

C. Peran Pendampingan Langsung dan Literasi Digital: Pendampingan langsung menjadi faktor penting karena penyediaan kode QR dan profil lokasi saja belum cukup apabila pelaku usaha belum memahami cara menggunakannya. Pendampingan langsung terbukti lebih efektif dibandingkan penyampaian materi satu arah (Aziz et al., 2026), dan rasa percaya terhadap keamanan merupakan modal utama sebelum pelaku usaha berani menggunakan pembayaran digital (Husna et al., 2024). Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), penjelasan manfaat berkaitan dengan persepsi kemanfaatan, sedangkan praktik langsung bersama pemilik usaha berkaitan dengan persepsi kemudahan penggunaan. Pola ini serupa dengan pendampingan pada Warung Alfarizqi yang melaporkan peningkatan literasi digital,

kenaikan rata-rata pembeli harian dari 20 menjadi 25 orang, dan transaksi QRIS pertama kali, serta merekomendasikan pendampingan lanjutan (Nikmah & Wafa, 2025). Pada kegiatan di Dusun IV (Veteran), waktu pendampingan lebih singkat dan dampak ekonomi belum diukur sehingga pengaruh terhadap penjualan belum dapat disimpulkan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat: Program berjalan lancar berkat dukungan dan kerja sama perangkat desa, pihak sekolah, dan masyarakat dalam memberikan izin dan arahan, kekompakan antaranggota kelompok KKN, antusiasme masyarakat dan pelaku usaha, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu sehingga pendampingan hanya menjangkau dua UMKM, perbedaan tingkat pemahaman digital dan keraguan terhadap keamanan pembayaran nontunai, serta kesibukan pelaku usaha dan padatnya agenda kegiatan desa. Kendala tersebut tidak terlalu besar dan diatasi melalui koordinasi, penjelasan yang sabar dan berulang, serta penyesuaian jadwal.

E. Keberlanjutan dan Pengembangan Program: Keberlanjutan hasil kegiatan bergantung pada pemanfaatan QRIS dan Google Maps secara rutin oleh mitra, pembaruan informasi usaha secara berkala, dan penyebaran pengetahuan kepada pelaku usaha lain di Dusun IV (Veteran) dengan dukungan perangkat dusun. Program dapat dikembangkan dengan menambah jumlah mitra, melakukan pendampingan lanjutan, memanfaatkan riwayat transaksi QRIS untuk pencatatan keuangan sederhana, serta membimbing pelaku usaha menanggapi ulasan pelanggan. Pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, misalnya frekuensi transaksi QRIS dan jumlah penayangan profil usaha, diperlukan agar efektivitas program dapat dinilai lebih objektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan KKN Reguler UMSU tahun 2026 di Dusun IV (Veteran), Desa Kwala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, seluruh rangkaian program kerja selama dua belas hari (20-31 Agustus 2026) terlaksana 100% sesuai jadwal. Program utama berupa pendampingan pendaftaran QRIS dan pembuatan Google Maps berhasil membuat usaha tahu dan kedai memiliki alternatif pembayaran nontunai yang lebih praktis, pemahaman yang lebih baik mengenai cara kerja, manfaat, dan keamanan QRIS, serta lokasi usaha yang lebih mudah ditemukan calon konsumen, termasuk dari luar dusun. Program pendukung berupa edukasi, kegiatan keagamaan, dan gotong royong turut mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat.

Implikasinya, pendampingan langsung yang melibatkan pemilik usaha pada setiap langkah dapat menjadi model sederhana yang dapat direplikasi pada UMKM lain di dusun pedesaan dengan karakteristik serupa. Kegiatan ini memiliki keterbatasan, yaitu waktu pelaksanaan yang singkat, jumlah mitra yang terbatas pada dua UMKM, dan evaluasi yang bersifat observasional tanpa pengukuran kuantitatif sehingga dampak terhadap transaksi, pendapatan, dan kunjungan konsumen belum dapat disimpulkan. Kendala yang ditemui dapat diatasi melalui koordinasi, penjelasan berulang, dan penyesuaian jadwal.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar (1) pelaku UMKM yang telah didampingi menggunakan QRIS secara rutin, memanfaatkan pencatatan transaksi otomatis untuk menata keuangan usaha, memperbarui informasi pada Google Maps secara berkala, serta menanggapi ulasan pelanggan; (2) perangkat dusun dan masyarakat mendorong penyebaran pengetahuan dan pendampingan serupa kepada pelaku usaha lain yang belum terjangkau; dan (3) pelaksana KKN berikutnya dan perguruan tinggi mengalokasikan waktu pendampingan yang lebih panjang disertai pendampingan lanjutan, serta menyertakan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan agar dampak program dapat dinilai lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Andriani, N., Rahmadyah, N., Novriansyah, D., Putri, A., & Mayori, E. (2023). Implementasi teknologi financial dalam QRIS sebagai sistem pembayaran digital pada sektor UMKM di Kota Binjai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i1.925>
- Aziz, L. S., Lutfi, M. A., Pratiwi, A. S., Adi, J. C., Novita, L. C., Apriliani, A. N., & Rahmah, H. (2026). Digitalisasi keuangan inklusif melalui implementasi QRIS pada pelaku UMKM. *Jurnal Pedati*, 4(1), 13-24. <https://journals.usm.ac.id/index.php/pedati/article/view/14655>
- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. Bank Indonesia.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Husna, A., Arsyad, A. J., Permata, R. A., Insani, C. N., & Mala, F. (2024). Integritas sistem pembayaran digital (QRIS) bagi pelaku UMKM. *Bakti Sekawan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.35746/bakwan.v4i2.675>
- Jubaedah, S., Frihatini, F., Prihanifa, N., Rahmadani, O., Rahma, C. S., & Sipahutar, H. (2026). Pendampingan digitalisasi UMKM jasa laundry melalui implementasi QRIS dan pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps. *Prosiding Ruang Inspirasi Manajemen*, 5(3), 111-117. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSM/article/view/62367>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nikmah, Z., & Wafa, Z. (2025). Implementasi QRIS dan pendaftaran lokasi Google Maps untuk mendukung digitalisasi transaksi UMKM Warung Alfarizqi. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 5(2), 244-249. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/ABDIMASSOSIORA/article/view/10703>

- Puspasari, D., & Utami, I. (2025). Pemanfaatan Google Maps dan QRIS sebagai strategi digitalisasi UMKM di Desa Neglasari. *JANNAH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 293-302.
- Putri, S. R. (2022). Peluang dan tantangan financial technology (fintech) dalam sistem pembayaran berbasis QRIS pada UMKM di Kecamatan Medan Kota. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Rimadias, S., & Hibatillah, R. (2023). Pendampingan dan pembuatan media informasi, QRIS dan Google Maps pada UMKM Warung Opa pada kawasan Kelapa Dua. *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 59-66.
- Widowati, N., & Khusaini, M. (2022). Adopsi pembayaran digital QRIS pada UMKM berdasarkan technology acceptance model. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 325-347. <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.2.15>